

LAPORAN KINERJA (LKj)



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan [perda 19/2018](#) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor:Perbub 107/2018

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul, Februari 2020

Kepala,



Drs. Fatoni

NIP. 19640718 199003 1004

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah berpedoman kepada perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan ([perda nomor 19/2018](#)) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baadan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : [Perbub 107 /2018](#)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : (Perda 8 tahun 2019) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantu[. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor : 121Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusun kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- d. Pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan lingkungan kantor dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap dua (2) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100 %. Ada dua (2) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (89.76 % lebih), meliputi :

1. Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2020 tingkat partisipasi masyarakat kita dalam berdemokrasi sangat tinggi ini dibuktikan dengan hasil perhitungan kita, bahwa partisipasi masyarakat sebesar 81.69 %

2. Kondusifitas Masyarakat yang stabil.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai, ini dapat kita ukur dari capaian program kegiatan Badan Kesbangpol dalam pencapaian kondusifitas masyarakat yang stabil sebesar 100 %.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar	
Bab I Pendahuluan.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Pembentukan OPD.....	
C. Susunan Organisasi.....	
D. Keragaman SDM	
E. Isu Strategis.....	
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	
1. Visi dan Misi	
2. Tujuan dan Sasaran	
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.....	
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	
1. Sasaran	
2. Sasaran	
3. Sasaran	
4. Sasaran	
5. dst.....	

C. Akuntabilitas Anggaran	
D. Efisiensi Sumber Daya.....	
Bab IV Penutup	

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst.....
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020.....
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020.....
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi.....	
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan.....	
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin	
Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural	
Gambar III.1	
Gambar III.2	

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan evaluasi kinerja menjadi suatu *issue* strategis yang harus diperhatikan dan dilaporkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Evaluasi kinerja juga merupakan tahap penting dalam mengevaluasi pelaksanaan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh komponen organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dengan didasarkan pada perencanaan kinerja yang baik, maka pelaksanaan kinerja juga dapat diukur tingkat pencapaiannya secara operasional, serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat dan tepat.

Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah/publik harus lebih terbuka dan transparans dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Rencana Kinerja (Performance Plan) merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-undang No : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, maka pada awal tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) untuk tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini merupakan konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disepakati melalui nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dalam kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan yang ada.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, dengan demikian materi laporan sedikit banyak menyangkut bidang hukum, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang meliputi masalah sosial dan politik.

B. Pembentukan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Kabupaten Bantul Nomor : 121 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusun kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- d. Pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan lingkungan kantor dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

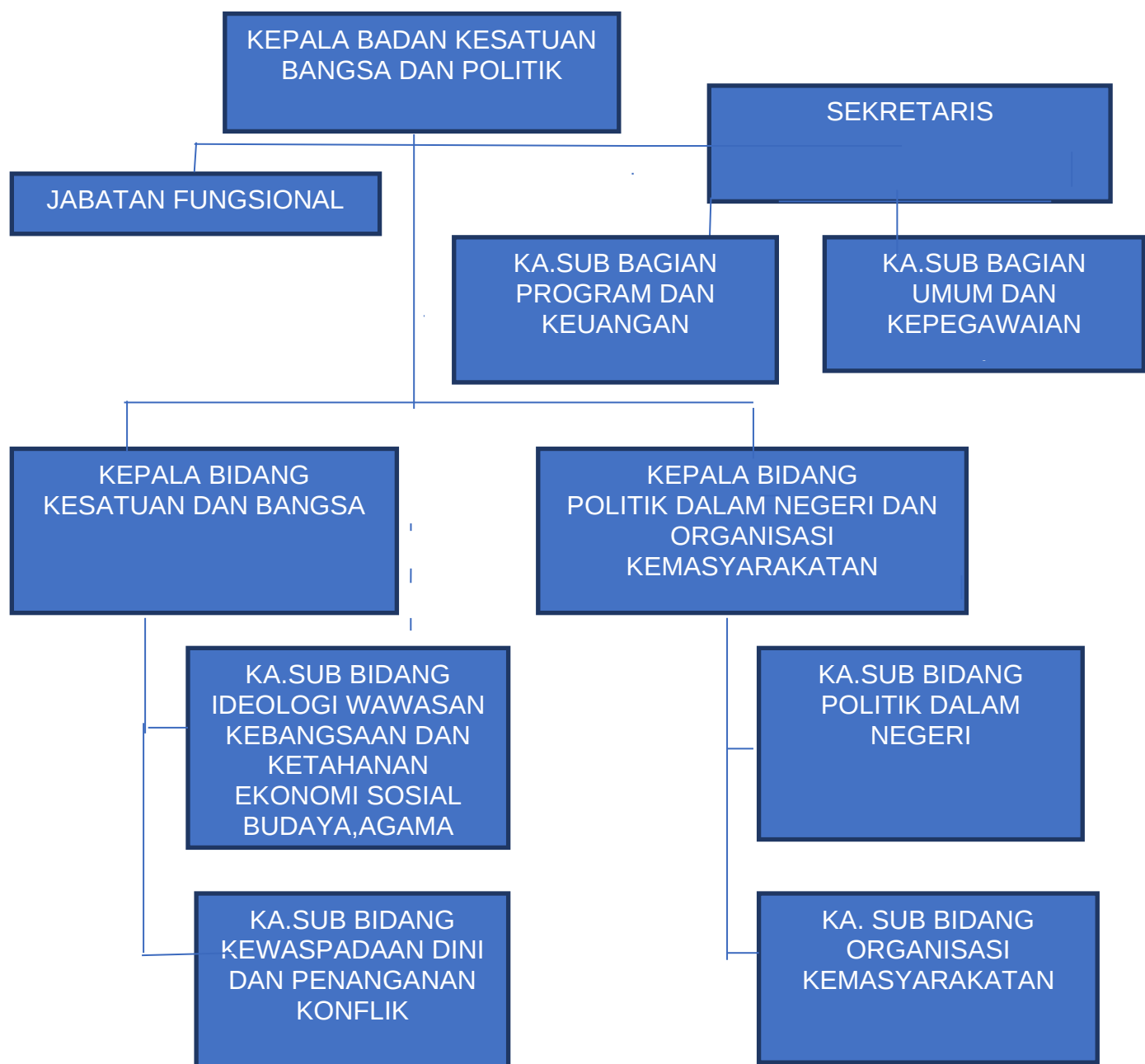
Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut : Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
 - a) Kasubag. Prog. & Keu
 - b) Kaubag. Umum
- c. Kabid Kesatuan Bangsa;
 - a) Kasubid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, social dan Budaya , Agama.
 - b) Kasubid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
- d. Kabid Ormas & Poldagri;
 - a) Kasubid Ormas
 - b) Kasubid Poldagri
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan, kemudian masing-

masing Kepala Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Unsur pendukung penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

D. Keragaman SDM

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul memiliki SDM/ASN sebanyak 19 orang, terdiri 6 orang perempuan (33 %) dan 13 orang laki – laki (67 %), hal ini menunjukkan bahwa perimbangan gender yang belum baik. Secara definitif jumlah SDM Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 17 orang Jabatan struktural di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 9 orang, terdiri dari 5 orang laki – laki dan perempuan 4.

Tabel I.1 Jenjang pendidikan dan jabatan struktural per jenis kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			Jabatan Struktural
		SMA	S1	S2	
1.	Laki - laki	8	5	0	5
2.	Perempuan	-	3	1	4

Sumber : Kantor Kesbangpol

Sedangkan berdasarkan pendidikan , SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul di dominasi oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 8 orang (47 %) disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (47 %), sedang untuk jenjang pendidikan S2 sebanyak orang (%). Selengkapnya


 dapat di : garis mitra kerja
 : garis komando
 : garis koordinasi

erikut :

Tabel I.2 Jumlah ASN berdasarkan jenjang pendidikan.

No.	Pendidikan	Jumlah ASN
-----	------------	------------

1.	Starta 2	1
2.	Starta 1	8
3.	SMA	8

Sumber : Kantor Kesbangpol.

E. Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi dan berbagai aspek pembangunan dan upaya mewujudkan stabilitas sosial politik, persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan energi yang besar dan terencana, serta melibatkan seluruh stake holder, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam perkembangan dewasa ini, harus diakui masih selalu ada pihak – pihak yang menginginkan adanya perpecahan dan konflik atas nama suatu kepentingan tertentu. Mereka tidak ingin melihat negara Indonesia yang aman, tentram dan damai

Penentuan isu startegis menjadi bagian penting bagi keseluruhan, penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021 karena dari tahapan ini akan diketahui apakah tatangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Kantor beserta jajarannya selama 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal – hal yang telah dikemukakan sebelumnya serta dengan mempertimbangkan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menetapkan isu – isu strategis sebagai berikut :

1. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu modal dasar dalam suksesnya pembangunan.
2. Stabilitas sosial politik sangat penting bagi terciptanya persatuan dan kesatuan.
3. Pengaruh globalisasi di segala sektor kehidupan termasuk dalam bidang idelologi bangsa harus diwaspadai dengan meningkatkan wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat.
4. Terwujudnya hubungan yang harmonis dengan ormas, LSM dan parpol.
5. Terwujudnya Masyarakat yang kondusif menjadi modal utama terciptanya masyarakat yang Stabil.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul ingin mewujudkan masyarakat Bantul yang berkarakter Pancasila guna mendukung pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bupati mendukung Misi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yaitu:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI : “ TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG DEMOKRATIS, PARTISIPATIF, HARMONIS, BERKEADILAN DAN BERADAB YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN ”				
Misi		Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1.	Meningkatkan partisipatif aktif masyarakat menuju kehidupan yang demokratis, harmonis, berkeadilan dan beradab yang	Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokrasi, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berbasis pada	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	Prosentase pemilih yang berpartisipasi

Misi		Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
	berkebangsaan	partisipasi aktif masyarakat berdasar pada moral dan HAM dalam bingkai NKRI		
2.	Mewujudkan stabilitas masyarakat (Ipoleksosbudhankam) melalui pengkajian masalah-masalah strategis daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Mewujudkan stabilitas sosial di seluruh aspek kehidupan masyarakat terhadap segala hal yang mengancam keutuhan NKRI	Kondusifitas masyarakat yang stabil	Jumlah intoleransi di masyarakat

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2

Strategi dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Bupati

Visi : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bantul yang Demokratis, Partisipatif, Harmonis, Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan partisipatif aktif masyarakat menuju kehidupan yang demokratis, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berkebangsaan			
Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokrasi, harmonis, berkedilan dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat berdasar pada moral dan HAM dalam bingkai NKRI	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
		Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih	Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh semua agama
		Meningkatkan peran dan fungsi LSM/ormas/Parpol dalam pembangunan	Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpo
		Meningkatkan peran dan fungsi agama dalam pembangunan	
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang moral dan HAM	
Misi 2 : Mewujudkan stabilitas masyarakat (Ipoleksosbudhankam)melalui pengkajian masalah-masalah strategis daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik			
Mewujudkan stabilitas sosial di seluruh aspek kehidupan masyarakat	Kondusifitas masyarakat yang stabil	Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
		Meningkatkan	Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan

Visi : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bantul yang Demokratis, Partisipatif, Harmonis, Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan”

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
terhadap segala hal yang mengancam keutuhan NKR		wawasan kebangsaan	kebangsaan
		Meningkatkan kerukunan antar umat beragama .	Melaksanakan dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan .

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
6. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Bupati dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai	Prosentase pemilih yang berpartisipasi

	semua jenjang pemerintahan	
2	Kondusifitas masyarakat yang stabil	Jumlah intoleransi di masyarakat

Sumber : Renstra Kantor Kesbangpol tahun 2016 - 2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2020, IKU dan APBD. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

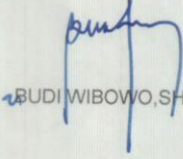
Nama : Drs. F A T O N I
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesbangpol
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : BUDI WIBOWO,SH.MM.
Jabatan : Bupati Bantul/Pj Bupati Bantul
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PihakKedua,
PJS.BUPATIBANTUL

BUDI WIBOWO,SH.MM.

Pihak Pertama,
PLT. Kepala Badan Kesbangpol

Drs. F A T O N I
NIP. 196407181990031004


Lampiran Perjanjian Kinerja

Organisasi Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kondusifitas masyarakat yang stabil.	Jumlah Intoleransi di Masyarakat.	Angka	0	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	0
2	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu sampai semua Jenjang Pemerintahan.	Persentase Pemilih yang berpartisipasi.	%	75	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	75

Program

Anggaran

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 142.803.237,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 115.860.000,00
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp 150.489.825,00
4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp 75.907.425,00
5. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp 421.113.000,00
6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Rp 25.350.000,00
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp 319.659.925,00
JUMLAH	Rp 1.251.183.412,00

Bantul, 11 Nopember 2020

Pihak Kedua,

PLT. BUPATI BANTUL

BUDI WIBOWO, SH.MM

Pihak Pertama

PLT. Kepala Badan Kesbangpol



Drs. FATON

NIP. 196407181990031004

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya partisipasi memilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta BUdaya Politik.
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
2.	Kondusifitas masyarakat yang stabil	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Sumber : Kantor Kesbangpol

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Prosentase pemilih yang berpartisipasi	75	81.69	108.92
2	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	100

Sumber : Kantor Kesbangpol.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020, dengan rata-rata capaian sebesar

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masuk kriteria tinggi adalah indikator Jumlah intoleransi di masyarakat dengan realisasi dua (0) yaitu al:

hal ini berarti wilayah Kabupaten Bantul masih perlu adanya perhatian dari pemerintah dalam hal pembinaan Intoleransi di masyarakat.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) prosentase pemilih yang berpartisipasi dapat melebihi target yang kita rencanakan sehingga hasilnya sangat memuaskan.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan.

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan masyarakat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul selalu berupaya untuk dioptimalkan. Hal tersebut selain dari tuntutan regulasi peraturan perundangan juga sebagai wujud respon dan kepedulian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul untuk selalu memperbaiki pelayanan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini didukung dengan program Pendidikan Politik Masyarakat.

Program ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya pendidikan politik dan berorganisasi bagi masyarakat agar masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik di Kabupaten Bantul. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan meningkatnya partisipasi politik serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Adapun sasarannya adalah

1. Terbinanya Ormas, Orsos, dan LSM
2. Meningkatnya partisipasi politik
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
4. Terasilinasinya Partai Politik dalam pencairan dana bantuan keuangan
5. Tertib administrasi pengurus Partai Politik
6. Pendidikan demokrasi bagi generasi muda

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

No	Indikator Kinerja	Capaian	2020	Target	Capaian s/d
----	-------------------	---------	------	--------	-------------

	Utama	2017	Target	Realisasi	% Realisasi	Akhir Renstra (2021)	2019 terhadap 2021 (%)
1.	Prosentase pemilih yang berpartisipasi	-	75	81.69	108.92	75 %	108.92

Sumber : Kantor Kesbangpol

Capaian kinerja untuk indikator kinerja utama prosentase pemilih yang berpartisipasi tahun 2020 sudah melebihi target yang telah ditentukan ,ini merupakan sebuah capaian yang patut kita banggakan dan mudah-mudahan capaian yang akan datang juga lebih baik.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 75 %.

Indikator kinerja utama prosentase pemilih yang berpartisipasi tahun 2021 tidak ditargetkan karena tidak ada pemilihan umum. Namun kalau dilihat prosentase pemilih yang berpartisipasi pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4 Realisasi Prosentase pemilih yang berpartisipasi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase pemilih yang berpartisipasi	86.77	75	81.69	108.92	75 %	115,69

Sumber : Kantor Kesbangpol

Berdasarkan hasil capaian pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebesar 81.69 % ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan cukup tinggi. Hal tersebut tercapai dengan upaya Rapat pimpinan daerah membahas persiapan dan permasalahan Pemilu serta Sosialisasi Pemilu.

Permasalahan :

1. Pemahaman tentang arti penting dan regulasi tentang pemilu yang masih perlu ditingkatkan.

Solusi :

1. Sosialisasi dan dialog terkait dengan politik dan pemilu
2. Melakukan koordinasi dan sinergisitas kegiatan yang terkait dengan politik dan pemilu.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Inkator Kinerja Utama Prosentase pemilih yang berpartisipasi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- b. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai politik, dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk menunjang pelaksanaan kerja.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Persentase pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu pada tahun 2020 di targetkan sebesar 75 % dan ternyata mendapatkan respon dari masyarakat yang cukup tinggi sebesar 81.69 %.

Program ini di dukung dengan 2 (dua) Kegiatan, yaitu ;

- a. Pendidikan politik di masyarakat
- b. Pendampingan ormas, orsos dan LSM

2. **Sasaran** Kondusifitas masyarakat yang stabil

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan masyarakat kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul selalu berupaya untuk dioptimalkan. Hal tersebut selain dari tuntutan regulasi peraturan perundangan juga sebagai wujud respon dan kepedulian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul untuk selalu memperbaiki pelayanan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini didukung dengan program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan Lingkungan di Masyarakat dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat).

Program ini dilaksanakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat

Tabel III. 5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kondusifitas masyarakat yang stabil.

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	0	100%	0	100%

Sumber : Kantor Kesbangpol

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 0, realisasi 0 tercapai 100% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Untuk Tahun 2020 ini angka intoleransi di Bantul tidak ada, adanya peran FKUB dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, perlunya menjaga kerukunan antar umat beragama.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja utama Jumlah intoleransi di masyarakat adalah 0 kasus, ini menunjukkan bahwa kondisi di wilayah Kabupaten Bantul sudah dalam koridor yang stabil dan perlu dijaga kewaspadaan kita agar lebih kondusif. Hal ini tercapai melalui koordinasi di tingkat pimpinan, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat serta peningkatan dialog tokoh umat beragama.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 0. :

Permasalahan :

1. Isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) yang rentan memicu konflik.

Solusi :

1. Dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat beserta dengan pemerintah untuk membahas kondisi kerukunan.
2. Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat melalui FKUB, FPK dan FKDM sampai di tingkat Kecamatan

Langkah strategis kedepan untuk mempertahankan Indikator Kinerja Utama Jumlah intoleransi di masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1, Mengoptimalkan Peran FKUB,FPK dan FKDM dalam menjaga kerukunan antar umat beragama ,Suku dan Antar Golongan, cegah dan Deteksi Kewaspadaan Dini di Masyarakat.
2. Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Hal ini berhubungan dengan kebijakan kepegawaian secara umum sehingga diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama dengan instansi terkait di pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama gedung Kantor dan peralatan Gedung Kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik;
4. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran . Sasaran Kondusifitas masyarakat yang stabil , program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Persentase FKUB aktif pada tahun 2020 mentargetkan 100 % terealisasi dengan capaian sebesar 100%, program ini di dukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu ;

- a. Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis
- b. Pemantauan orang asing.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan pada tahun 2020 mentargetkan 100 % terealisasi sebesar dengan capaian sebesar 100%. Program ini di dukung dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu ;

- a. Pendidikan Wawasan Kebangsaan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keteriban dan Keamanan.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Prosentase FKDM tingkat Kecamatan pada tahun 2020 mentargetkan 100 % terealisasi sebesar 17 Kecamatan dengan capaian sebesar 100 %. Program ini di dukung dengan 2 (dua) Kegiatan, yaitu ;

- a. Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.
- b. Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan.

4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Capaian Program ini ukur dengan indikator Menurunnya penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba) pada tahun 2020 mentargetkan peringkat 3 (tiga) dengan capaian peringkat 4

Program ini di dukung dengan 2 (dua) Kegiatan, yaitu ;

- a. Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin (Dengan adanya Pandemi Covid 19 kita tidak bias melaksanakan kegiatan ini dan dilalihkan untuk kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Covid 19)
- b. Pencegahan Penyuluhan narkoba.

Selain program pendukung sasaran ada 2 (dua) program rutin yang masuk dalam Belanja Langsung Pendukung yang di ampu oleh Sekretaris yang terkait dengan operasional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Program ini bersifat *supporting* dari tugas pokok fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul program tersebut antara lain;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Nilai AKIP pada tahun 2020 mentargetkan 85 terealisasi sebesar 77.41 % dengan capaian sebesar 100 % Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Program ini di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2020 mentargetkan 100 terealisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 99.14%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja program ini tercapai sebesar 98 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 1%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 99%. Program ini di dukung dengan 3 (Tiga) Kegiatan, yaitu ;

1. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pengadaan Peralatan & Perlengkapan

B. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebesar Rp 1.251.183.412 yang digunakan untuk membiayai

Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 1.225.929.610 , atau sebesar 97.98 %.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	319.659.925	26
2	Kondusifitas masyarakat yang stabil	672.860.250	54
Jumlah		992.520.175	80
Belanja Langsung Pendukung		258.663.237	21
Total Belanja Langsung		1.251.183.412	100

Sumber :

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Prosentase pemilih yang berpartisipasi	75	81.64	109	319.659.925	298.892.925	93.50
2	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	100	672.860.250	669.887.325	99.55
Jumlah					992.520.175	968.780.250	97.60
Belanja langsung pendukung					258.663.237	257.149.860	99.41
Total belanja langsung					1.251.183.412	1.225.930.110	98

Sumber : : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

C. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 2 %, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 2.40 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0.59 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Kondusifitas masyarakat yang stabil, memiliki efisiensi anggarannya paling besar dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan, efisiensi anggarannya terkecil dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendidikan Politik dimasyarakat dengan anggaran Rp 302.399.925 ,- realisasi Rp 281.637.425,- efisiensi Rp 20.762.500,- Kegiatan FORKOM ormas ,orsos dan LSM dengan anggaran Rp 17.260.000,-realisasi Rp 17.255.500 efisiensi Rp.4.500,-
2. Kegiatan Pendidikan Wawasan kebangsaan anggaran Rp 283.950.000,- realisasi Rp 279.186.000,- dengan efisiensi Rp 4.765.000,-

Kegiatan Pemantauan orang asing anggaran Rp 495.000,- realisasiRp 490.500,-. Efisiensi Rp 4.500 Kegiatan FKUB dengan anggaran Rp 75.414.925,-Realisasi Rp 75.305.000,- Efisiensi Rp109.925,-

Kegiatan Pembinaan satuan keamanan lingkungan di Masyarakat anggaran Rp 57.887.500,- realisasi Rp 57.877.500,- Efisiensi Rp0,-

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaandini dan menjaga keamanan lingkungan Rp 83.310.500,- Realisasi Rp 82.447.500,- Efisiensi Rp 863.000,-

Kegiatan Pembinaan Jaga Warga Rp 279.925.000,- Realisasi Rp 279.925.000,- Efisiensi Rp 0

Kegiatan Penertiban dan Konseling Pelajar tidak disiplin anggaran Rp 0,-
Realisasi Rp,- Efisiensi Rp,-

Kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba anggaran Rp 25.350.000,-
realisasi Rp25.350.000,- efisiensi Rp 0,-

D. Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Prosentase pemilih yang berpartisipasi	319.659.925	298.892.925	2.076.700	0.1
2	Jumlah intoleransi di masyarakat	672.860.250	669.887.325	2.972.925	0.1
Jumlah		992.520.175	968.780.250	5.049.625	0.2
Belanja Langsung Pendukung		258.663.237	257.149.860	1.513.377	0.6
Total Belanja langsung		1.251.183.412	1.225.930.110	25.253.302	0.9

Sumber : : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 92.84 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

